

UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

Oleh :

Sri Dayati

Dosen Fakultas Isipol Universitas Tidar Magelang

ABSTRACT

The movement of empowering society in the development gives priority to the initiative and creation of the society. The main strategy is giving power to the society empowering society is closely related to the creating employment and chance in the end, it is hoped that it can improve the society welfare.

Key Words : initiative, creative, innovative

A. PENDAHULUAN

Istilah pemberdayaan masyarakat digunakan secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat, yang berarti mengembangkan potensi ekonomi rakyat, hakekat dan martabat, ras, percaya diri dan harga dirinya, sehingga terpelihara tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan berpusat pada masyarakat menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, juga nilai tambah sosial dan budaya. Masyarakat memiliki kekuatan yang bila digali dan disalurkan akan berubah menjadi energi besar untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Program “kemitraan usaha” merupakan program andalan yang dipromosikan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan sekaligus pemetaan disamping diperlukan bentuk intensif lain

dari pemerintah yang mampu memacu investasi swasta dan memperluas kesempatan kerja. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan keluarga merupakan kondisi keharusan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga kesesjahteraan rakyat dapat diwujudkan yang ditandai dengan adanya kemakmuran, yaitu meningkatkan konsumsi yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan.

METODE

Metode yang digunakan adalah riset perpustakaan dan mengkritisi tulisan-tulisan di media massa adapun masalah-masalah yang disajikan dalam seminar ilmiah.

B. PEMBAHASAN

Arti dan Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi jaringan kerja dan keadilan dan diletakkan pada kekuatan tingkat individu sosial. Menurut Rappaport (1987), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologi pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak-haknya menurut Undang-undang. Mc Ardle (1989) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan.

Sebaliknya masyarakat harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak ketrampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpartisipasi.

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi potensial dalam meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini, akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat.

Cara terbaik untuk mengatasi masalah pembangunan adalah menumbuhkan semangat wiraswasta dalam kehidupan masyarakat, berani mengambil resiko, bersaing, menumbuhkan semangat untuk bersaing, dan menemukan hal baru (inovasi) melalui partisipasi masyarakat. Strategi pembangunan meletakkan partisipasi masyarakat sebagai fokus isu sentral pembangunan saat ini. Strategi pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif masyarakat, efikasi, efisiensi dan sikap kemandirian.

Kata pemberdayaan (empowerment) mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu:

Pertama, kecenderungan primer, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya (survival of the fittest). Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kedua,

kecenderunagna sekunder, menekan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan/keberdayaan untuk menentukan yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Kedua, proses tersebut saling terkait dan agar kecenderungan primer dapat terwujud, sering harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu (Pranaka dan Vidhyandika, 1996).

Pembangunan Masyarakat

Pembangunan masyarakat adalah preoses yang dirancang untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih maju dan sehat bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi aktif mereka. Pembangunan di tingkat desa bersumber pada satu pandangan bahwa perubahan masyarakat dapat dicapai secara optimal bila ditempuh melalui partisipasi aktif yang luas dan seluruh masyarakat tingkat bawah (grassroot) dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya tujuan akhir, tetapi juga proses untuk mencapai tujuan akhir tersebut sehingga tujuan utamanya yakni mengembangkan kemampuan masyarakat dapat berfungsi secara interaktif tujuan akhir tersebut juga dapat melibatkan diri dalam cara kerja sama atas dasar swakarya dan menggunakan proses atau prosedur yang demokratis sebagai tujuan pokok.

Struktur dan kondisi permasalahan yang selalu dihadapi masyarakat adalah kurang aktifnya partisipasi warga masyarakat. Biasanya masyarakat diikat oleh tradisi yang sifatnya tertutup dari pengaruh luar. Caranya adalah memotivasi warga masyarkat agar terlibat aktif dalam proses perubahan. Paratisipasi aktif seluruh warga masyarakat dalm pembangunan

menjadi tujuan utama proses perubahan. Bila masyarakat dengan kesadaran dan motivasi sudah terlibat aktif, berarti perubahan sudah tercapai. Prinsip pembangunan yang partisipatif menegaskan bahwa rakyat harus menjadi pelaku utama (subyek) dalam pembangunan. Ini membutuhkan kajian strategis yang lebih intensif tentang rekrutisasi sistem sosial.

Masyarakat memiliki banyak potensi, baik dilihat dari sumber daya yang ada maupun dari sumber sosial budaya. Masyarakat memiliki "kekuatan" yang bila digali dan disalurkan akan berubah menjadi energi besar untuk mengatasi masalah mereka. Cara menggali dan mendayagunakan sumber daya yang ada di masyarakat menjadi inti pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat, faktor terpenting adalah bagaimana mendukung masyarakat pada posisi pelaku (subyek) pembangunan yang aktif, bukan hanya penerima yang pasif. Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat.

Masyarakat yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhannya. Mereka juga dilatih untuk dapat merumuskan rencananya serta melaksanakan pembangunan secara mandiri. Gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berinti "dari, oleh dan untuk" masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan gerakan pembangunan harus didorong dan ditumbuhkembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Jiwa partisipasi masyarakat adalah semangat solidaritas sosial, yaitu hubungan sosial dan cita-cita bersama. Karena itu, seluruh warga masyarakat harus bekerja sama, saling membantu dan

mempunyai komitmen moral dan sosial yang tinggi dalam memasyarakatkan gerakan pemberdayaan dalam semua aspek dan tingkatan.

Pembangunan Ekonomi Rakyat

Keberpihakan pada ekonomi rakyat, berarti melakukan serangkaian upaya untuk menyusun aturan main ekonomi yang adil, yaitu menempatkan ekonomi rakyat pada posisi yang sama derajat dengan usaha menengah dan besar, sehingga persaingan usaha dapat berjalan sehat. Pemihakan tidak berarti memenangkan yang lemah, tetapi agar persaingan sehat dan seimbang, antara ekonomi konglomerat yang minoritas dan ekonomi rakyat yang mayoritas.

Ekonomi rakyat diartikan ekonomi pribumi (*people's economy is endogenous economy*), bukan aktivitas perekonomian yang berasal dari luar aktivitas masyarakat. Ekonomi rakyat diartikan perekonomian atau perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang berkembang relatif lambat, sesuai dengan kondisi yang melekat pada masyarakat tersebut, dalam hal ini masyarakat di pedesaan. Ekonomi rakyat lebih bersifat operasional dan mikro.

Pada tataran ekonomi makro, pemberdayaan ekonomi harus disinergikan dengan sistem atau kebijakan pemerintah. Sistem atau kebijakan tersebut dikategorikan dengan ekonomi kerakyatan, yaitu kebijakan atau sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem ekonomi kerakyatan mencakup administrasi pembangunan nasional, yaitu mulai dari sistem perencanaan hingga sistem pemantauan dan pelaporan.

Program “kemitraan usaha” merupakan program andalan yang dipromosikan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan. Penguatan jaringan kemitraan usaha merupakan upaya menjalin kerjasama antar perilaku usaha dan para pendukungnya secara setara dan sinergis guna mencapai tujuan yang tidak hanya saling menguntungkan diantara perilaku kemitraan, tetapi juga bermanfaat bagi semua. Dalam kondisi pasar tidak bersaing karena terdistorsi, usaha kemitraan hanya akan menguntungkan pihak (produsen) tertentu yang memiliki konsesi atau hak monopoli, sementara produsen lain akan tetap menanggung biaya inefisiensi. Konsumen golongan miskin adalah yang paling menderita, karena harus membayar harga produk yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang seharusnya dibayarkan dalam kondisi pasar bersaing yang lebih sehat.

Peranan pemerintah dimasa mendatang perlu diarahkan sebagai regulator dan fasilitator, antara lain 1. Menyiapkan perangkat aturan yang diperlukan. 2. Melaksanakan “penegakan” hukum dan aturan untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana umum agar mekanisme pasar bekerja secara sehat dan efisien. 4. Merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan makro ekonomi dan menciptakan iklim kondusif untuk perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. 5. Merumuskan dan melaksanakan program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tujuan menekan “kesenjangan” dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara selektif, dengan target grup yang jelas dan menghindari kebijaksanaan “berpihak” yang mendistorsi pasar.

Memacu Investasi Swasta dan Memperluas Kesempatan Kerja

Disamping meningkatkan sarana dan prasarana umum, diperlukan kebijaksanaan pemerintah yang mampu memacu investasi swasta di wilayah pedesaan. Deregulasi dalam birokrasi pelayanan dan perizinan, memangkas pungutan, merupakan bentuk intensif yang dapat meningkatkan investasi swasta. Disamping itu, diperlukan bentuk insentif lain (termasuk pemerintah untuk menarik arus investasi ke pedesaan, misalnya dengan mekanisme keringanan pajak untuk jangka waktu tertentu); Dimasa mendatang, diperlukan kebijaksanaan pemerintah yang mengarah arus investasi ke wilayah pedesaan dan wilayah pertumbuhan baru. Langkah ini termasuk langkah “keberpihakan” yang diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan.

Masalah yang muncul adalah kegiatan usaha apa yang perlu diprioritaskan pengembangannya di wilayah pedesaan. Dalam memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan, yang penting adalah menyediakan lapangan kerja bagi penduduk di pedesaan. Untuk itu prioritas harus diberikan kepada kegiatan usaha yang mempunyai keterkaitan yang besar.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Keluarga

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kondisi keharusan untuk memacu pertumbuhan ekonomi merupakan prakondisi keharusan untuk mengaktualisasikan kemampuan dan potensi sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat ditempuh melalui pendidikan (formal dan non formal) dan penyuluhan, peningkatan kesehatan dan nutrisi, serta penyediaan rangsangan

untuk berusaha, termasuk penyediaan akses terhadap modal kerja dan pelayanan umum lainnya. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang penting adalah penajaman daya nalar, peningkatan ketrampilan dan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semangat dan etos kerja, disiplin dan tanggung jawab, serta peningkatan kemampuan kewirausahaan.

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan perlu dilakukan kepada seluruh masyarakat di pedesaan, khususnya keluarga prasejahtera. Pengetahuan dan ketrampilan dapat diberikan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Bagi anggota keluarga dewasa dan mereka yang masuk usia kerja, prioritas diberikan pada kegiatan peningkatan ketrampilan, misalnya melalui kegiatan latihan kerja dan ketrampilan.

Disamping pengetahuan dan ketrampilan teknis, sumber daya manusia perlu dibekali dengan kemampuan kewirausahaan. Pengetahuan dan kemampuan berbisnis dapat diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman bisnis. Koperasi diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan.

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan ditandai dengan adanya kemakmuran, yaitu meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan. Pendapatan meningkat karena adanya pelaku ekonomi, berperan dalam proses pembangunan, mempunyai kemampuan sama, dan bertindak rasional. Artinya, yang memproduksi harus ikut menikmati pendapatan dan pengeluaran yang sesuai dengan pengorbanannya.

Karena kemampuan masyarakat tidak sama dan tidak merata, maka pemerintah berperan penting dalam menciptakan iklim kondusif sehingga setiap pelaku ekonomi akan mempunyai kemampuan sama dalam menghasilkan dan menikmati hasil pembangunan.

Kesejahteraan rakyat dapat terwujud apabila pembangunan mengarah ke perubahan struktur masyarakat, yang diawali dan proses peningkatan produksi dan distribusi, selanjutnya membuka kesempatan kerja. Kesempatan kerja menciptakan pendapatan dan kesempatan untuk peningkatan tabungan yang digunakan untuk pembentukan modal bagi perubahan teknologi. Perubahan teknologi, akhirnya akan kembali menciptakan kesempatan kerja yang luas. Proses ini harus berjalan berkesinambungan sehingga kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat akan terwujud.

Tingkat adaptasi dan kemampuan masyarakat beragam, perbedaan tingkat kemakmuran kadang-kadang sulit dihindarkan. Perbedaan tingkat kemakmuran dapat melebar, sehingga tercipta (kesenjangan antara yang mampu dan yang belum mampu, antara yang masih kecil dan yang sudah besar, dan antara yang sudah maju dan yang masih tertinggal, yang selanjutnya, kesenjangan dapat memicu keresahan sosial.

Pemberdayaan masyarakat modern yang lebih maju lebih diarahkan pada penciptaan iklim yang menunjang dan peluang untuk maju, sekaligus pada penanaman pengertian bahwa suatu saat mereka wajib membantu yang lemah. Pemberdayaan masyarakat yang masih tertinggal tidak hanya cukup dengan meningkatkan produktivitasnya, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan memberikan bantuan modal, tetapi juga dengan menjamin adanya kerjasama dan kemitraan yang

erat antara yang telah maju dan yang lemah atau belum berkembang. Pemberdayaan masyarakat perlu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan.

Pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan penciptaan kesempatan kerja dan peluang berusaha yang memberikan pendapatan yang memadai bagi masyarakat. Setiap anggota masyarakat disyaratkan terlibat dalam proses pembangunan, mempunyai kemampuan sama, dan bertindak rasional. Pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat perlu diprioritaskan pada penduduk miskin melalui antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan permodalan yang didukung oleh kegiatan pelatihan yang berintegrasi sejak dan kegiatan perhimpunan modal, penguasaan teknis produksi, pemasaran hasil dan pengelolaan surplus usaha. Pendekatan yang tepat dalam pengembangan ekonomi rakyat melalui pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama. Pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara bertahap, terus menerus, dan terpadu, didasarkan kemandirian, yaitu meningkatkan kemampuan penduduk miskin untuk menolong diri mereka sendiri.

C. SIMPULAN

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini akhirnya dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Cara menggali dan memberdayakan sumber daya yang ada di masyarakat menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat. Gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan

inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok, memberi kekuatan kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan penciptaan kesempatan kerja dan peluang berusaha yang dapat memberikan pendapatan yang memadai bagi masyarakat, dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Mathis, Rolerth & Jhon H, Jakson, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Salemba Empat.
- Fakih, Mansonk, 2001, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hikmat, Harry, 2001, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : Humaniora Utama Press.
- Jurnal Analisis Sosial* Volume 6 Nomor 1, Februari 2002, Bandung.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*.